



Catatan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia Akan Diperiksa Oleh Kelompok Kerja Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review) Dewan Hak Asasi Manusia PBB

JENEWA (4 November 2022) – Catatan HAM Indonesia akan diperiksa oleh Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB untuk keempat kalinya pada Rabu, 9 November 2022 dalam sebuah pertemuan yang disiarkan langsung melalui [UN Web TV](#).

Indonesia merupakan salah satu negara yang akan direview oleh Kelompok Kerja UPR pada sesi ke-41 yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 18 November, yang menandai dimulainya siklus keempat UPR. Tinjauan UPR [pertama, kedua, dan ketiga](#) di Indonesia berlangsung masing-masing pada April 2008, Mei 2012, dan Mei 2017.

Dokumen-dokumen yang menjadi dasar tinjauan adalah: 1) laporan nasional - informasi yang diberikan oleh Negara yang ditinjau; 2) informasi yang terkandung dalam laporan para ahli dan kelompok hak asasi manusia independen, yang dikenal sebagai Prosedur Khusus, badan perjanjian hak asasi manusia, dan entitas PBB lainnya; 3) informasi yang diberikan oleh pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga hak asasi manusia nasional, organisasi regional dan kelompok masyarakat sipil.

Tiga **laporan** yang menjadi dasar tinjauan Indonesia pada 9 November dapat dilihat di [sini](#).

Lokasi: Room 20, Palais des Nations, Jenewa

Waktu dan tanggal: Rabu, 9 November 2022, pukul 09.00 – 12.30 waktu Jenewa, atau pukul 14 .00-17.30 WIB

UPR adalah proses unik yang melibatkan tinjauan berkala terhadap catatan hak asasi manusia dari 193 Negara Anggota PBB. Sejak pertemuan pertama diadakan pada April 2008, ke-193 negara anggota PBB telah ditinjau tiga kali dalam siklus UPR pertama, kedua, dan ketiga. Selama siklus UPR keempat, Negara-negara diharapkan kembali menjelaskan langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk menerapkan rekomendasi yang diajukan selama tinjauan mereka sebelumnya yang mereka berkomitmen untuk menindaklanjutinya, serta menyoroti perkembangan hak asasi manusia terkini di negara tersebut.

Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Bapak Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM.

Tiga perwakilan negara yang bertindak sebagai pelapor (“troika”) untuk tinjauan Indonesia adalah: Malawi, Uzbekistan, dan Negara Plurinasional Bolivia.

Siaran web sesi akan ada di <http://webtv.un.org>

Daftar pembicara dan semua pernyataan yang tersedia untuk disampaikan selama peninjauan Indonesia akan diposting di [ekstranet UPR](#).

Kelompok Kerja UPR dijadwalkan untuk mengadopsi rekomendasi yang dibuat untuk Indonesia pada pukul 15.30 (waktu Jenewa) tanggal 11 November. Negara yang ditinjau mungkin ingin mengungkapkan posisinya atas rekomendasi yang diajukan selama peninjauan mereka.

SELESAI

Untuk informasi lebih lanjut dan permintaan media, silakan hubungi Rolando Gómez, HRC Media Officer, di rolando.gomez@un.org, Matthew Brown, HRC Public Information Officer, di matthew.brown@un.org, atau Pascal Sim, HRC Public Information Officer, di simp@un.org

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Tinjauan Berkala Universal, kunjungi:
<https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/upr-main>

Dewan Hak Asasi Manusia PBB, ikuti kami di media sosial: [Facebook](#) [Twitter](#) [YouTube](#) [Instagram](#)